

**PERAN GREENPEACE DALAM MENGURANGI DEFORESTASI
DI KALIMANTAN SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

A MUH YUSUF ISLAM DJOEDDAWI

E 061 171 514

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN GREENPEACE DALAM MENGURANGI
DEFORESTASI DI KALIMANTAN SELATAN

NAMA : A. MUH. YUSUF ISLAM DJ.

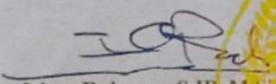
NIM : E061171514

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

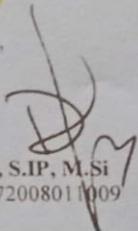
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 5 Oktober 2021

Pembimbing I,


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

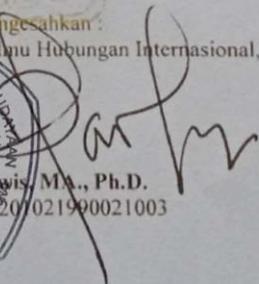
Pembimbing II,


Burhanuddin, S.IP, M.Si
NIP. 197602072008011009

Mengesahkan:

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,




H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196207021990021003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A Muh Yusuf Islam Djoeddawi

NIM : E061171514

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

PERAN GREENPEACE DALAM MENGURANGI DEFORESTASI DI KALIMANTAN SELATAN

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Oktober 2021

Yang menyatakan,



(A Muh Yusuf Islam Dj)

ABSTRAK

A. Muh. Yusuf Islam Djoeddawi, E061171514 dengan judul skripsi “Peran Greenpeace dalam mengurangi Deforestasi di Kalimantan Selatan” di bawah bimbingan Ishaq Rahman, S.IP, M.Si sebagai pembimbing I dan Burhanuddin, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Greenpeace dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat Greenpeace dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu library research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh penulis melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, laporan, serta dari berbagai media lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Greenpeace dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan yaitu: menerbitkan laporan-laporan tentang perusakan hutan, melakukan konfrontasi langsung dalam menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi melalui sosial media, melakukan *lobbying*, dan Kemitraan Greenpeace dengan NGO. Adapun faktor yang menjadi pendukung Greenpeace dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan yaitu: Kearifan lokal masyarakat yang ramah terhadap kawasan hutan, Kemitraan bersama pemerintah dan kemitraan bersama NGO. Sedangkan faktor penghambat Greenpeace dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan yaitu: pengawasan hutan yang belum optimal, kebutuhan produksi yang tinggi, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan perusahaan yang melakukan praktik tersembunyi.

Dalam menjalankan perannya dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan, Greenpeace tidak bisa merubah suatu kebijakan yang ada disuatu Negara. Greenpeace hanya sebatas memainkan fungsinya untuk membangun hubungan antara masyarakat dengan proses politik, namun dengan kegiatan itu, Greenpeace dapat mengubah pandangan publik agar merespon dan mempengaruhi keputusan pemerintah.

Kata Kunci : Greenpeace, Deforestasi, Kalimantan Selatan

ABSTRACT

A. Muh. Yusuf Islam Djoeddawi, E061171514 with the thesis title "The Role of Greenpeace in Reducing Deforestation in South Kalimantan" under the guidance of Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as supervisor I and Burhanuddin, S.IP, M.Si as supervisor II, at the Department International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Makassar.

This study aims to determine the role of Greenpeace in reducing deforestation in South Kalimantan. In addition, this study also aims to look at the supporting and inhibiting factors of Greenpeace in reducing deforestation in South Kalimantan. The research method used is descriptive method with data collection techniques, namely library research using secondary data obtained by the author through books, journals, documents, articles, reports, and from various other media which are analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that Greenpeace's role in reducing deforestation in South Kalimantan are: publishing reports on forest destruction, conducting direct confrontation in conveying aspirations, advocating through social media, lobbying, and Greenpeace's partnership with NGOs. The factors that support Greenpeace in reducing deforestation in South Kalimantan are: Local community wisdom that is friendly to forest areas, Partnership with the government and partnership with NGOs. Meanwhile, Greenpeace's inhibiting factors in reducing deforestation in South Kalimantan are: forest monitoring that is not optimal, high production needs, inadequate facilities and infrastructure, and companies carrying out hidden practices.

In carrying out its role in reducing deforestation in South Kalimantan, Greenpeace cannot change a policy that exists in a country. Greenpeace is only limited to playing its function to build a relationship between the community and the political process, but with this activity, Greenpeace can change public opinion to respond and influence government decisions.

Keywords: Greenpeace, Deforestation, South Kalimantan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN... ..	ii
KATA PENGANTAR... ..	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT... ..	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konsep... ..	6
E. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Teknik Pengumpulan Data... ..	12
3. Teknik Analisis Data.....	13
4. Metode Penulisan... ..	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep <i>International Non-Governmental Organization</i>	14
1. Definisi NGO	14
2. Pengelompokan NGO	16
3. Fungsi NGO	20
4. Peran NGO... ..	22
B. Konsep Keamanan Lingkungan	24
C. Penelitian-penelitian Sebelumnya	28

BAB III GAMBARAN UMUM

A.	Organisasi	
Greenpeace		30
1. Profil Greenpeace		30
2. Tujuan Greenpeace.....		35
3. Sejarah Greenpeace di Indonesia		37
B. Greenpeace dan Isu Deforestasi... ..		38
C. Gambaran Umum tentang Deforestasi di Indonesia-Kalimantan Selatan		41
BAB IV PEMBAHASAN		
A. Peran Greenpeace dalam upaya Mengurangi Deforestasi di Kalimantan Selatan		54
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Greenpeace dalam upaya Mengurangi Deforestasi di Kalimantan Selatan		71
1. Faktor Pendukung		71
2. Faktor Penghambat.....		74
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan		78
B. Saran.....		80
DAFTAR PUSTAKA		81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik penurunan luas hutan alam di Indonesia	39
Gambar 2. Tutupan Hutan Alam Tahun 2000-2017.....	40
Gambar 3. Wilayah Kalimantan Selatan yang Terdampak Banjir	42
Gambar 4. Perubahan Hutan di Kalimantan Selatan	43
Gambar 5. Penurunan Luas Lahan Tutupan Pohon di Kalimantan Selatan	44
Gambar 6. Luas kawasan hutan dan non hutan (Ha).....	47
Gambar 7. Advokasi Greenpeace pada media sosial instagram... ..	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber kehidupan manusia serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata. Namun seiring perkembangan zaman, manusia mendominasi, mengeksploitasi dan mencari keuntungan di hutan secara berlebihan demi kepentingannya. (Keraf, 2014)

Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh dunia sedang menghadapi krisis lingkungan karena penggundulan hutan yang berlebihan, sehingga menyebabkan berbagai masalah. Setiap tahun hutan hujan dunia dieksploitasi dan dimusnahkan, sehingga menyebabkan terjadinya Deforestasi. Deforestasi merupakan konversi hutan yang menjadi alternatif penggunaan lahan non-hutan yang bersifat permanen seperti pertanian, penggembalaan, atau pembangunan perkotaan. Negara-negara berkembang menjadi perhatian bagi deforestasi karena menyusutnya dan berkurangnya area hutan hujan tropis dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan spesies-spesies di hutan hujan tropis (Okia, 2012). Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi dengan angka 339.888 hektare (ha) pada tahun 2018 angka tersebut berada di urutan ketiga setelah Brasil 1.35 juta ha dan kongo 481.248 ha. (Mikaela Weisse, 2020)

Masalah deforestasi juga terjadi di Indonesia tepatnya di Kalimantan. Sebuah penelitian antara tahun 1973 hingga tahun 2015, yang dipublikasikan oleh Scientific Reports lebih dari 400 citra satelit landsat pulau Kalimantan dimana penelitian ini bertujuan untuk menelusuri jejak deforestasi hutan di Kalimantan. Dalam penelitian ini, pada tahun 1973, ada sebanyak 76 persen, atau 55,8 juta hektar lahan di Kalimantan adalah hutan hujan tua dan ilmuwan mengatakan bahwa 18.7 hektar hutan digunduli antara tahun 1973 hingga 2015. (Ramsay, 2016)

Sebagian besar penyebab deforestasi yang terjadi di Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan adalah kebutuhan produksi yang terus meningkat yang selaras dengan pertumbuhan perekonomian indonesia, sehingga pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan biaya rendah tanpa memikirkan akibat yang berkelanjutan. Salah satu wilayah Kalimantan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah daerah Kalimantan selatan, daerah tersebut memiliki kontribusi peningkatan perekonomian melalui tambang seperti batubara, minyak bumi, emas, dan lain-lain. Keterlibatan perusahaan menyebabkan deforestasi, tercatat hamper 50% dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan selatan dikuasai oleh pihak swasta. Hal ini menciptakan darurat ruang dan darurat bencana ekologis. (Detik News, 2021)

Indonesia pada tahun 2019 menempati posisi ketiga sebagai Negara yang kehilangan hutan hujan paling banyak akibat deforestasi sebanyak 324 ribu hektar. Konversi hutan di Kalimantan menjadi pertambangan dan kelapa sawit inilah yang menyebabkan deforestasi di Indonesia. Diperkirakan sejak tahun 2015 sampai 2019

sekitar 4,4 juta hektar lahan atau setara dengan 8 kali luas pulau Bali terbakar antara tahun 2015-2019. Deforestasi menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Hilangnya hutan berupa pepohonan akan menimbulkan berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Untuk dampak lebih besarnya deforestasi dapat menyebabkan terjadinya krisis iklim. Hal ini terjadi karena hutan menjadi tempat penyimpanan daur ulang karbondioksida yang cukup besar. Lebih dari 300 miliar ton karbondioksida tersimpan didalam hutan, sehingga akibat dari deforestasi, karbondioksida akan lepas begitu saja ke atmosfer sehingga mempercepat perubahan iklim. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi salah satu Negara penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia. (Kompas, 2020)

Luas hutan alam di Indonesia tahun ke-tahun mengalami perosotan. Untuk di Kalimantan selatan sendiri, pada tahun 2000 luas hutan Kalimantan sebanyak 33.234.711 ha, tahun 2009 menjadi 28.358.386 ha, tahun 2013 menurun kembali menjadi 26.886.772 ha, dan 2017 menjadi 24.834.752 ha. (katakata, 2021)

Adapun data terbaru menurut Manager Kampanye Walhi Kalsel M Jefri Raharja mengatakan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain faktor curah hujan yang tinggi, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Data yang dimilikinya, pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit terjadi secara terus menerus. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus

meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun. Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 13 persen hanya 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 ialah 54.238 hektar. Pihaknya menyangkan kondisi hutan di Kalimantan yang kini beralih menjadi lahan perkebunan. Pembukaan lahan atau perubahan tutupan lahan juga mendorong laju perubahan iklim global. Perluasan lahan secara masif dan terus menerus, menurut Jefri memperparah bencana terutama di kondisi cuaca ekstrem. (Kompas, 2021)

Kekhawatiran masyarakat dunia akibat permasalahan lingkungan hidup membuat dunia perlu membuat suatu goبران yang akan menyuarkan permasalahan lingkungan di dunia. Permasalahan lingkungan hidup memunculkan berbagai gerakan lingkungan hidup di tahun 60-an disebabkan oleh degradasi lingkungan akibat merosotnya perekonomian dan aktivitasnya. (Ikbar, 2014) Gerakan peduli lingkungan yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat menjadi suatu harapan bersama agar tercipta bumi yang memberikan kehidupan nyaman dan aman serta terhindar dari kerusakan.

Organisasi lingkungan yang termasuk didalamnya yaitu *Greenpeace*. Organisasi ini sebagai aktor non-negara berbentuk organisasi non pemerintahan (INGO) yang pergerakannya berbasis lingkungan dan bergerak dalam bidang perdamaian lingkungan. *Greenpeace* juga menjadi suatu organisasi internasional yang berkampanye dalam lingkungan secara global. *Greenpeace* hadir lebih dari 55 negara yang terdiri dari Asia, Eropa, Amerika, Pasifik, dan Afrika. *Greenpeace* merupakan NGO yang secara resmi masuk di Asia Tenggara pada tahun 2000-an dengan melihat

banyak populasi spesies tanaman dan hewan yang terancam punah, Hal ini pula yang mendasari fokus utama *Greenpeace* di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. (Putri, 2019)

Greenpeace sebagai organisasi internasional memiliki cita-cita utama agar menjaga bumi yang makin rapuh ini tetap mempunyai kemampuan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Untuk mencapai hal itu, *Greenpeace* berkampanye untuk menghentikan dan menentang perusakan-perusakan lingkungan yang sedang terjadi, dan menawarkan solusi terhadap praktek perusakan lingkungan itu. (Greenpeace Indonesia)

Greenpeace sebagai organisasi internasional melihat deforestasi lingkungan sebagai sesuatu yang merusak ekosistem dan keberlangsungan makhluk hidup yang ada didalamnya. Deforestasi menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, seperti berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Untuk dampak lebih besarnya deforestasi dapat menyebabkan terjadinya krisis iklim. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai lingkungan dan keikutsertaan *Greenpeace* menjadi hal yang penting untuk dibahas dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menambah wawasan terkait Peran *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Peran *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan. Dengan batasan tersebut, agar

penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran *Greenpeace* dalam upaya mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat *Greenpeace* dalam upaya mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana deforestasi di hutan Kalimantan Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi terkait peran *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan dan memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep Hubungan Internasional secara umum.
- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pengambil kebijakan, khususnya dalam melindungi hutan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu konsep sebagai landasan dalam penelitian. Konsep International Non Government Organization (I-NGO) akan menjelaskan bagaimana peran *Greenpeace* sebagai suatu organisasi internasional dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan Selatan dan melihat bagaimana permasalahan lingkungan menjadi isu krusial yang dibahas dalam organisasi internasional. Isu lingkungan menjadi penting untuk dibahas oleh organisasi internasional karena hampir setiap negara pernah terdampak oleh kerusakan lingkungan. Sedangkan keamanan lingkungan menjadi landasan bagaimana daya dukung alam (the global common) yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan umat manusia.



Sumber: Analisa penulis

1. International Non Governmental Organization (I-NGO)

NGO (*Non-Governmental Organization*) atau Organisasi Non-Pemerintah telah dikenal dan diperdebatkan dalam Hubungan Internasional pada awal abad ke-20, signifikansinya digolongkan ke dalam aktor transnasional yang bersifat independen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa NGO tergolong ke dalam aktor global yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam sebuah gerakan sosial. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa NGO dapat menggantikan peran suatu negara. Organisasi non-pemerintahan dapat bersifat organisasi internasional yang disebut International Non-Governmental Organization (INGO) dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut Non-Governmental Organization (NGO) saja. Perbedaannya hanya keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. NGO dikenal sebagai perkumpulan perorangan (*private*) berskala internasional tidak mengatasnamakan pemerintah masing-masing dan melewati batas-batas negara, dan organisasi itu biasanya tidak melibatkan pemerintah secara langsung (Coulumbis, 1999) NGO pada umumnya berkonsentrasi pada isu-isu politik tingkat rendah (*low politics*), misalnya: masalah ekonomi, social, budaya dan lingkungan hidup.

Riker (dalam Gaffar, 2006) mengungkapkan bahwa NGO atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/INGO merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana.

NGO/NGO juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/NGO tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO. Riker (dalam Gaffar, 2006) juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/NGO memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah. (Gaffar, 2006)

Menurut Clive Archer, ada 3 peran organisasi internasional (Archer, 2001) yakni:

1. Sebagai instrumen, dimana organisasi internasional sebagai suatu alat yang dapat digunakan oleh Negara untuk mencapai tujuannya berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena, dimana organisasi internasional menjadi tempat untuk mempertemukan anggota-anggotanya untuk membahas masalah –masalah yang akan dihadapi.
3. Sebagai actor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat suatu keputusan-keputusan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar organisasi.

NGO atau NGO memiliki peran dalam proses pembangunan sebuah negara.

Noeleen Heyzer (dalam L Syarifa, 2006:203) mengidentifikasi 3 (tiga) jenis peran yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu:

1. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya,
2. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.
3. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan definisi diatas organisasi internasional memegang peranan penting dalam dunia internasional. Kasus deforestasi di hutan Kalimantan yang membutuhkan berbagai pihak dalam proses penanganannya termasuk *Greenpeace* sebagai INGO. Hal ini karena banyaknya kasus deforestasi secara berlebihan tanpa memikirkan dampak keberlanjutannya.

2. Konsep Keamanan Lingkungan

Pasca perang dingin, konsep keamanan dalam hubungan internasional menjadi luas pengertiannya dan tidak lagi dibatasi oleh militer saja. Setelah Perang Dingin berakhir, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan seakan semakin leluasa mewarnai diskursus hubungan internasional sebab hal ini mengesankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara menurun. Laporan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) berorientasi pada keamanan manusia dimana laporan yang dikeluarkan pada tahun 1994 berjudul *dimension of human security* yang mengkategorikan tujuh macam ancaman yang terkait dengan keamanan manusia. Tujuh kategori tersebut adalah ancaman ekonomi, kesehatan, personal, komunitas, politik, makanan dan lingkungan. Keamanan suatu Negara sebelum adanya gagasan ini dibatasi dengan konteks wilayah. Kemudian keamanan

internasional diperluas sehingga fokusnya tidak hanya terbatas wilayah saja dan tak hanya menaruh perhatian di aspek tersebut. Bidang ekonomi menjadi bagian dari keamanan kehidupan penduduk, dimana keamanan ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat suatu Negara sehingga Negara untuk menjalankan fungsinya akan melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, kegiatan ekonomi seringkali membawa akibat yang buruk bagi lingkungan. (Sudiar, 2019)

Aktivitas ekonomi manusia bertambah dengan sejalanannya kebutuhan manusia yang tidak pernah cukup. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk meningkatkan aktivitas produksi dengan mengeksploitasi alam. Pasar global turut melanggengkan aktivitas produksi industri yang berlebihan dan membuat masyarakat menjadi konsumtif. Aktivitas produksi cenderung dilakukan tanpa melihat bagaimana dampak lingkungan yang berkelanjutan ditambah lagi tingkat pertumbuhan populasi yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya alam yang ada. Padahal, level konsumsi terus naik. Dalam hal ini, 20% penduduk dunia mengonsumsi 80% sumber daya alam. Bahkan, beberapa negara berkembang yang memiliki populasi besar bergerak ke gaya hidup konsumtif. Inilah yang dipandang sebagai paradoks dalam isu keamanan lingkungan. (Wilde, 2008)

Kenyataan bahwa gaya hidup kontemporer yang ditopang oleh struktur global saat ini memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Dampak yang diterima lingkungan akibat aktivitas manusia ini tak kalah memprihatinkan. Luas hutan mengecil. 33,8 juta are hutan ditebang atau dibakar setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2025, dua pertiga populasi dunia akan kesulitan

mendapat air bersih. Pencemaran laut dan udara semakin tinggi akibat industri. Limbah pabrik mengandung logam berat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi hasil laut. Peningkatan racun dari limbah diperkirakan mencapai 3 juta ton. Limbah ini menyebar lintas batas negara tiap tahun. Di udara, gas emisi seperti karbondioksida, akan meningkatkan efek rumah kaca. Salah satu akibatnya adalah hilangnya 50.000 jenis tanaman dan spesies hewan tiap tahun. (Sayyidati, 2017)

Berdasarkan konsep keamanan lingkungan, maka deforestasi hutan di Kalimantan terus tergerus dan jika dibiarkan dapat mengancam keamanan lingkungan yang akan merembet kepada kemanan manusia. Aktivitas manusia yang berlebih dan daya dukung alam yang tidak seimbang akan mengakibatkan masalah yang besar seperti krisis lingkungan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Tipe ini berupaya menggambarkan bagaimana situasi dan perkembangan bagaimana situasi deforestasi di Kalimantan yang dikaitkan dengan bagaimana *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk buku, jurnal,

dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni analisis data kualitatif. Penulis akan melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan mengenai peran *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Kalimantan kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk menghasilkan argumentasi yang tepat.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep International Non-Governmental Organization (I-NGO)

1. Definisi I-NGO

Organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang di bentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat (*Intergovernmental Organization*) dan organisasi yang beranggotakan aktor-aktor non-negara (*Transnational Organizations* dan *Non-Governmental Organization*) (Archer, 2001)

NGO (*Non-Governmental Organization*) atau Organisasi Non-Pemerintah telah dikenal dan diperdebatkan dalam Hubungan Internasional pada awal abad ke-20, signifikansinya digolongkan ke dalam aktor transnasional yang bersifat independen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa NGO tergolong ke dalam aktor global yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam sebuah

gerakan sosial. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa NGO dapat menggantikan peran suatu negara. Organisasi non-pemerintahan dapat bersifat organisasi internasional yang disebut International Non-Governmental Organization (INGO) dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut Non-Governmental Organization (NGO) saja. Perbedaannya hanya keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. NGO dikenal sebagai perkumpulan perorangan (*private*) berskala internasional tidak mengatasnamakan pemerintah masing-masing dan melewati batas-batas negara, dan organisasi itu biasanya tidak melibatkan pemerintah secara langsung (Coulumbis, 1999) NGO pada umumnya berkonsentrasi pada isuisu politik tingkat rendah (*low politics*), misalnya: masalah ekonomi, social, budaya dan lingkungan hidup.

Riker (dalam Gaffar, 2006) mengungkapkan bahwa NGO atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/NGO merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/NGO juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/NGO tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO. Riker (dalam Gaffar, 2006) juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/NGO memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat.

Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah. (Gaffar, 2006)

Menurut studi yang dilakukan oleh Salomon dan Anheier (1994) dalam (Shigetomi, 2002, p. 6) mendefinisikan NGO sebagai sebuah organisasi yang mempunyai enam karakteristik sebagai berikut: 1) *non-governmental*, 2) *non-profit making*, 3) *voluntary*, 4) *of a solid and continuing form*, 5) *altruistic*, 6) *philanthropic*.

Berawal dari syarat menjadi “non-governmental” berarti sebuah NGO harus melaksanakan pengambilan keputusannya sebagai sebuah organisasi yang terlepas dari keinginan pemerintah. Persyaratan kedua bahwa sebuah NGO harus “non-profit making” berarti bahwa kegiatannya tidak boleh didorong oleh motif mencari keuntungan, dan bahwa keuntungan apa pun yang mungkin timbul dari kegiatannya tidak boleh dibagi di antara para anggotanya untuk keuntungan pribadi. Syarat ketiga, yaitu “voluntary”, berarti bahwa satu-satunya syarat untuk menjadi anggota adalah keinginan seseorang untuk berpartisipasi. Partisipasi tidak boleh bergantung pada milik beberapa organisasi lain. Syarat keempat, “of a solid and continuing form”, artinya, berbeda dengan berbagai bentuk kegiatan sukarela yang dilakukan secara ad hoc, sebuah NGO harus merupakan entitas yang berkesinambungan dengan bentuk organisasi yang kokoh.

Keempat persyaratan di atas terinspirasi dari perbandingan antara sektor NGO di negara maju. Untuk tujuan pembahasan NGO di negara berkembang, tampaknya perlu untuk memperkenalkan dua persyaratan lebih lanjut. Syarat kelima, "altruistic", berarti bahwa tujuan langsung sebuah NGO adalah bertindak untuk kepentingan orang lain. Penambahan syarat ini diperlukan karena pemberian bantuan kepada masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi merupakan motivasi penting bagi pendirian NGO dalam membangun masyarakat. Persyaratan ini ditambahkan untuk membedakan NGO dari organisasi lingkungan dan NGO yang didirikan untuk kepentingan bersama tertentu dari warga masyarakat. Persyaratan terakhir, "philanthropic", berarti bahwa sebuah NGO memiliki prospek yang buruk untuk menerima pembayaran yang memadai dari penerima layanan yang ditawarkan oleh NGO di negara-negara berkembang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Akibatnya, NGO harus mengumpulkan dana untuk kegiatan mereka dari sumber selain penerima layanan. Mengingat sifatnya yang non-pemerintah, ini berarti bahwa mereka harus mengandalkan kontribusi dari sektor swasta mereka untuk porsi yang signifikan dari pendanaan mereka.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa definisi NGO dalam tulisan ini yakni NGO merupakan suatu organisasi non-profit yang bebas dari campur tangan pemerintah, dengan anggota yang bersifat *voluntary* tetapi tetap dalam bentuk organisasi formal, dan tidak berorientasi kekerasan serta memiliki nilai-nilai yang dianut dan dijalankan secara bersama yang

bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tertentu dengan berfokus advokasi dan atau upaya operasional pada sosial, politik dan ekonomi tujuan, termasuk ekuitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

2. Pengelompokan NGO

Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu operasional dan advokasi. Yang dimaksud dengan operasional yaitu NGO menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi „klien“ yang membutuhkan. Sementara advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Dalam melakukan praktek advokasi, NGO menggunakan berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli serta penasehat, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor, dan mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda, ataupun melakukan boikot. (Hudson, 2002)

Terkait dengan NGO lingkungan itu sendiri, secara umum NGO Lingkungan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, diantaranya: (Gough & Shackley, 2001, pp. 334-335)

a. Campaigners.

NGO yang termasuk dalam kategori *campaigners* merupakan kelompok NGO yang dikenal umum oleh masyarakat dan memiliki hubungan langsung dengan

publik. Kelompok inilah yang biasanya aktif memberikan informasi maupun menggerakkan masyarakat dalam suatu isu perjuangan.

b. Think-tank.

NGO yang termasuk dalam kategori ini merupakan kelompok NGO yang terdiri dari ilmuwan serta analis profesional. Kelompok ini biasanya terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan melalui dialog teknis mengenai isu tertentu dengan pihak-pihak tertentu, seperti sektor privat maupun pemerintah.

c.. Business alliance

NGO dalam kelompok ini merupakan NGO yang berafiliasi dan dan mewakilkan kepentingan komunitas bisnis tertentu. NGO lingkungan itu sendiri percaya bahwa pemerintah harus meningkatkan regulasi dari korporasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan (Kim, 2011, p. 17). Greenpeace termasuk ke dalam kategori *Campaigners*. NGO yang termasuk dalam kategori *campaigners* merupakan kelompok NGO yang dikenal umum oleh masyarakat dan memiliki hubungan langsung dengan publik. Kelompok inilah yang biasanya aktif memberikan informasi maupun menggerakkan masyarakat dalam suatu isu perjuangan. (Syarifuddin, 2017)

Adapun menurut Philip Eldrige, NGO dapat dikelompokkan menurut Skop kegiatannya yaitu:

a. Development

NGO Kategori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya.

b. Mobilization

NGO memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin. Isu-isu yg diusung misalnya yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar dikotakota besar.

Selain itu Eldrige juga mengelompokan NGO dalam konteks hubungan dan Jarak dengan pemerintah, sebagai berikut:

a. High Level Partnership: Grassroots Development

NGO yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat advokasi. Kegiatan NGO ini tidak bersinggungan dengan proses politik, namun mereka mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. NGO jenis ini umumnya tidak begitu besar dan banyak bersifat local

b. High Level Politics: Grassroot Mobilization

NGO dalam katagori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya contohnya adalah LP3ES, WALHI, YLKI, YLBHI. Mereka

pada umumnya tidak begitusaja dapat bekerjasama dengan pemerintah. NGO dalam kategori ini bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik.

3. *Empowerment at the Grassroot*

NGO dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya. Mereka tidak berminat untuk mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah, mereka percaya bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah.

Greenpeace merupakan salah satu NGO yang bersifat Mobilization NGO. Hal ini karena Greenpeace sebagai salah satu NGO yang memusatkan perhatiannya pada isu-isu yang berhubungan dengan ekologi atau lingkungan. Selain itu Grenpeace juga dapat digolongkan sebagai *High Level Politics: Grassroots Mobilization* , hal ini karena Greenpeace memiliki kegiatan yang aktif dan partisipatif terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Inodonesia serta berusaha dan mengupayakan agar masyarakat Indonesia peka terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. (Ramadhan, 2019)

Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi dinamika tata kelola lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh NGO (Isnaeani & Tamzil, 2016, p. 98):

a Memiliki pengetahuan dan pemikiran yang inovatif tentang isu-isu lingkungan global karena sepesialisasi bidang garapan yang mereka tempuh.

- b. Memiliki dedikasi terhadap tujuan yang bersifat lintas batas kepentingan nasional dan sektor.
- c. Memiliki representasi yang jelas terhadap konstituen utama mereka di negara tempat mereka berasal.
- d. Memiliki jejaring kerja yang bersifat transnasional dan bekerja secara efektif dalam membangun aliansi strategis.

3. Fungsi NGO

Dalam pelaksanaannya organisasi internasional tidak hanya menjalankan peran tertentu, namun juga melaksanakan fungsi-fungsi dalam kegiatannya pada sistem internasional. NGO memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam organisasinya. Fungsi dari organisasi internasional masih menurut Archer ada Sembilan fungsi (Archer, 2001) yaitu: 1) *Articulation and aggregation*, 2) *Norm*, 3) *Recruitment*, 4) *Socialization*, 5) *Rule-making*, 6) *Rule application*, 7) *Rule-adjunction*, 8) *Information* dan 9) *Operation* (Archer, 2001)

Adapun *United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pasific* (UNESCAP) menjelaskan bahwa NGO memiliki fungsi penting untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui kesadaran terhadap isu lingkungan serta menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah fungsi yang dijalankan oleh NGO (Pangaribuan, 2016, p. 18) :

- a. *Awareness* (Peningkatan Kesadaran)

Finnemore dan Sikkink (1998) sebagaimana dikutip oleh Pangaribuan, menjelaskan NGO sebagai *Norm Generator* berupaya membangkitkan kesadaran

norma kepada publik. Terdapat tiga tahap yang dilakukan yakni NGO memberikan perhatian kepada suatu kondisi kritis negara supaya menerima norma-norma baru (*norm emergence*), mensosialisasikan norma baru melalui penyuaran isu penting untuk membujuk masyarakat menerima norma tersebut (*norm cascade*), menyebarkan norma baru di antara masyarakat (*internalization norm*), Tahap internalisasi norma, dilakukan untuk mensinkronkan norma internasional ke dalam praktik-praktik domestik.

b. *Campaign* (kampanye)

Penyuaran (kampanye) dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat. NGO memainkan fungsinya untuk membangun hubungan antara masyarakat dengan proses politik. NGO dalam kegiatan ini dapat mengubah pandangan public supaya merespon dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Kampanye NGO telah memainkan peran penting dalam perubahan ekspektasi sosial.

Menurut Gritten dan Mola Yudego dalam tesis Riza Anastasia yang berjudul “Keberhasilan kampanye anti deforestasi greenpeace terhadap *asia pulp and paper app*”, untuk meningkatkan keberhasilan NGO dalam menjalankan kampanye-kampanyenya, NGO harus menyelesaikan strategi advokasi mereka dalam berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut seperti perusahaan target kampanyenya, lingkungan atau negara tempat mereka bekerja (misalnya pemerintahan yang berjalan memiliki kebebasan demokratis atau tidak), serta dukungan baik dari NGO-NGO lainnya maupun dari media. Faktor-faktor ini

menentukan kemampuan NGO untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan dari target kampanyenya (Anastasia, 2016, p. 13).

c. *Advocacy* (Advokasi)

NGO melakukan lobi kepada pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan dan adanya program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. NGO melakukan lobi kepada pemerintah karena kemampuan dalam mengakses informasi tanpa batas. Hal ini bertujuan guna perubahan kebijakan melalui laporan data yang dikumpulkan dari kondisi masyarakat ataupun pengorganisasian masyarakat. NGO juga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan melalui penyebaran informasi. NGO sebagai jaringan transnasional masyarakat sipil juga dapat memberikan informasi ke luar negeri tentang realita yang terjadi di suatu negara sehingga bisa menekan pemerintah untuk mempertimbang isu-isu yang terjadi.

d. Peran NGO

Menurut Clive Archer, ada 3 peran organisasi internasional (Archer, 2001) yakni:

1. Sebagai instrumen, dimana organisasi internasional sebagai suatu alat yang dapat digunakan oleh Negara untuk mencapai tujuannya berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena, dimana organisasi internasional menjadi tempat untuk mempertemukan anggota-anggotanya untuk membahas masalah –masalah yang akan dihadapi.

3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat suatu keputusan-keputusan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar organisasi.

LSM atau NGO memiliki peran dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer (dalam Gaffar, 2006:203) mengidentifikasi 3 (tiga) jenis peran yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu:

1. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Contohnya yaitu LSM atau NGO biasa bekerjasama dalam suatu program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat, misalnya pelatihan kerajinan tangan, edukasi menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah, dsb.

2. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Implementasinya yaitu biasanya LSM atau NGO mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. NGO dikatakan juga sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut. Sehingga NGO berperan dalam menentukan arah pembangunan, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

3. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. LSM atau NGO dalam kegiatannya biasa menekankan pada peningkatan sumber daya

manusia terutama masyarakat tingkat *grassroots* atau masyarakat bawah. Implementasinya yaitu berupa kegiatan pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna juga mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain: (Syarifah, 2019)

- a. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan *business*.
- b. Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
- c. Implementasi program pelayanan.

NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Jika melihat pendapat Heyzer di atas, Kalau kita mengacu pada pendapat Heyzer di atas, peran NGO dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: *pertama*, peranan dalam bidang non-politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam

bidang sosial ekonomi; dan *kedua*, peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

B. Konsep Keamanan Lingkungan

Isu lingkungan dalam Hubungan Internasional mulai di bahas setelah berakhirnya Perang Dingin dengan diselenggarakannya berbagai Konvensi ataupun perjanjian mengenai lingkungan global. Salah satunya mengenai isu kerusakan hutan atau deforestasi. Deforestasi merupakan konversi hutan yang menjadi alternatif penggunaan lahan non-hutan yang bersifat permanen seperti pertanian, penggembalaan, atau pembangunan perkotaan. Negara-negara berkembang menjadi perhatian bagi deforestasi karena menyusut dan berkurangnya area hutan hujan tropis dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan spesies-spesies di hutan hujan tropis.

Dalam studi keamanan Hubungan Internasional terdapat perbedaan dalam memaknai konsep keamanan, yaitu kelompok tradisional yang merupakan pandangan positivis dan kelompok wilderness (copenhagen) yang merupakan pandangan post-positivis. Kelompok tradisional menganggap bahwa keamanan tradisional berasal dari realis yang mana menurutnya, keamanan sebagai suatu kebebasan dari segala ancaman militer dalam sistem internasional yang anarki. Berdasarkan hal tersebut, negara sebagai aktor dalam dunia internasional hanya memiliki anggapan bahwasanya keamanan tersebut lebih berfokus terhadap bidang militer dan masalah ancaman perang. Kedua yaitu wilderness dipelopori oleh Barry Buzan, Lene Hansen, Huysmans dan Ole Waever dari Copenhagen School, yang menjelaskan definisi

keamanan lebih diperluas, keamanan tidak hanya berbicara mengenai militer saja, tetapi ada isu-isu lainnya yang juga penting dan bisa menimbulkan ancaman keamanan seperti politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. (Sulovic, 2016)

Pasca perang dingin, konsep keamanan dalam hubungan internasional menjadi luas pengertiannya dan tidak lagi dibatasi oleh militer saja. Setelah Perang Dingin berakhir, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan seakan semakin leluasa mewarnai diskursus hubungan internasional sebab hal ini mengesankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara menurun. Laporan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) berorientasi pada keamanan manusia dimana laporan yang dikeluarkan pada tahun 1994 berjudul *dimension of human security* yang mengkategorikan tujuh macam ancaman yang terkait dengan keamanan manusia. Tujuh kategori tersebut adalah ancaman 1.ekonomi, 2.kesehatan, 3.personal, 4.komunitas, 5.politik, 6.makanan dan 7.lingkungan. Keamanan suatu negara sebelum adanya gagasan ini dibatasi dengan konteks wilayah. Kemudian keamanan internasional diperluas sehingga fokusnya tidak hanya terbatas wilayah saja dan tak hanya menaruh perhatian di aspek tersebut. Bidang ekonomi menjadi bagian dari keamanan kehidupan penduduk, dimana keamanan ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat suatu negara sehingga negara untuk menjalankan fungsinya akan melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, kegiatan ekonomi seringkali membawa akibat yang buruk bagi lingkungan. (Sudiar, 2019)

Proposisi hubungan antara lingkungan dan keamanan manusia dapat ditelusuri kembali sebelum Laporan Pembangunan Manusia (HDR) 1994. Boutros Boutros-

Ghali, Sekretaris Jenderal PBB, merilis Agenda Perdamaian 1992, yang mengidentifikasi “kerusakan ekologis sebagai risiko baru bagi stabilitas”. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa ancaman yang lebih besar terhadap populasi yang terpapar dapat berasal dari penipisan lapisan ozon, bukan dari tentara musuh. Lebih jauh lagi, dampak kekeringan dan penyakit bisa sama dahsyatnya dengan senjata perang. Pada tahun yang sama, sebuah Komunike dari KTT Dewan Keamanan PBB pertama para Kepala Negara dan Pemerintahan mengakui bahwa “bentuk ketidakstabilan non-militer di bidang ekologi telah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan” (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1992).

Tinjauan Umum Keamanan Manusia tahun 2009 dari United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) menjelaskan karakteristik keamanan manusia sebagai konsep interdisipliner yang dapat menjadi penghubung antara keamanan manusia dan lingkungan, khususnya karakteristik multi-sektoral. Berdasarkan karakteristik tersebut, keamanan manusia telah memperluas konsep ancaman, mulai dari ekonomi, pangan, kesehatan, pribadi, komunitas, politik, dan salah satunya adalah keamanan lingkungan. Ancaman lingkungan terhadap keamanan saat ini telah meningkat secara dramatis dan diperparah oleh perubahan iklim. Perubahan iklim telah menyebabkan penggurunan, degradasi lahan dan kekeringan di Asia dan Afrika menyebar, secara langsung mempengaruhi jutaan orang termiskin di dunia. (Kusumawardani, 2017)

Pendekatan pertama yang menjadi cikal-bakal terbentuknya konsep keamanan lingkungan yaitu pendekatan yang bersifat statist atau berfokus pada negara dalam

penjelasannya. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pandangan keamanan tradisional yang berpegang pada asumsi dasar yaitu bahwa aktor utama ialah negara dan ancaman keamanan negara muncul dalam bentuk ancaman militer yang berasal dari negara lain. Dalam sudut pandang itulah kemudian para penganut pandangan keamanan lingkungan tersebut mencoba mencari kaitan antara lingkungan dan keamanan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana permasalahan lingkungan dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional melalui pengaruhnya dalam menimbulkan konflik kekerasan maupun peperangan.

Aktivitas ekonomi manusia bertambah dengan sejalannya kebutuhan manusia yang tidak pernah cukup. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk meningkatkan aktivitas produksi dengan mengeksploitasi alam. Pasar global turut melanggengkan aktivitas produksi industri yang berlebihan dan membuat masyarakat menjadi konsumtif. Aktivitas produksi cenderung dilakukan tanpa melihat bagaimana dampak lingkungan yang berkelanjutan ditambah lagi tingkat pertumbuhan populasi yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya alam yang ada. Padahal, level konsumsi terus naik. Dalam hal ini, 20% penduduk dunia mengonsumsi 80% sumber daya alam. Bahkan, beberapa negara berkembang yang memiliki populasi besar bergerak ke gaya hidup konsumtif. Inilah yang dipandang sebagai paradoks dalam isu keamanan lingkungan. (Wilde, 2008)

Kenyataan bahwa gaya hidup kontemporer yang ditopang oleh struktur global saat ini memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Dampak yang diterima lingkungan akibat aktivitas manusia ini tak kalah

memprihatinkan. Luas hutan mengecil. 33,8 juta are hutan ditebang atau dibakar setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2025, dua pertiga populasi dunia akan kesulitan mendapat air bersih. Pencemaran laut dan udara semakin tinggi akibat industri. Limbah pabrik mengandung logam berat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi hasil laut. Peningkatan racun dari limbah diperkirakan mencapai 3 juta ton. Limbah ini menyebar lintas batas negara tiap tahun. Di udara, gas emisi seperti karbondioksida, akan meningkatkan efek rumah kaca. Salah satu akibatnya adalah hilangnya 50.000 jenis tanaman dan spesies hewan tiap tahun. (Sayyidati, 2017)

C. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang penulis teliti dalam skripsi kali ini. Penelitian yang pertama yaitu, oleh Eka Azhari Syarifuddin, dalam penelitian skripsinya dengan judul “Strategi Market Campaign Greenpeace Dalam Menanggulangi Deforestasi Hutan Di Indonesia” dimana dalam tulisan ini bertujuan mengetahui strategi gerakan kampanye Greenpeace dan bagaimana dampaknya dalam menekan laju deforestasi di Indonesia. Walaupun memiliki kesamaan organisasi yang akan diteliti, namun yang membedakan adalah teori yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan perspektif teori gerakan sosial baru dan NGO dalam memandang strategi Greenpeace, sedangkan pada tulisan ini menggunakan konsep NGO dan keamanan lingkungan untuk memandang isu deforestasi di Kalimantan Selatan.

Penelitian selanjutnya yaitu dari Bella Putri, dengan judul “Upaya Greepeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan Di

Indonesia”, dimana perspektif yang digunakan yaitu Pandangan konstruktivis yang dalam melihat organisasi internasional. Pengaruh yang diberikan oleh organisasi internasional terhadap negara – negara anggota didalamnya dilihat konstruktivis sebagai penyebaran ide –ide yang mana hal tersebut dimaknai dan mampu merubah sikap dan perilaku negara. Selain itu, fokus penelitian tersebut yaitu bagaimana upaya Greenpeace dalam menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Untuk tulisan skripsi penulis kali ini, menggunakan konsep NGO dan spesifik kepada penanganan deforestasi di Kalimantan Selatan.

Penelitian ketiga yaitu dari Restu Zulfikar Ramadhan, dengan judul “Peran Ngo Greenpeace Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Kasus Kerusakan Hutan Oleh Perusahaan Internasional Wilmar”. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana Greenpeace mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dan fokusnya kepada Perusahaan internasional Wilmar. Dalam hal ini, penelitian tersebut meneliti dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Wilmar sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan upaya serta strategi seperti apa yang di gunakan Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia.

Sehingga dari ketiga penelitian tersebut yang membedakannya dengan skripsi ini yaitu tempat masalah yang diangkat dimana fokus penelitian ini di Kalimantan Selatan. Kedua, waktu yang di teliti dalam skripsi kali ini yaitu rentan waktu 2016-2021. Ketiga, konsep yang dibahas diskripsi kali ini adalah konsep NGO yang menjelaskan Greenpeace sebagai organisasi internasional dan konsep keamanan lingkungan yang melihat deforestasi sebagai suatu hal yang menjadi ancaman.